

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan Pengelolaan usaha pertambangan golongan C yang dikelola rakyat terutama oleh masyarakat penambang yang berada di sekitar lokasi penelitian, serta menganalisis penerimaan pajak Pertambangan terhadap Penerimaan Asli Daerah, dengan mengukur tingkat kontribusinya dari pajak pertambangan tersebut terhadap penerimaan daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder dengan periode yang dianalisis dari tahun 1997/1998 sampai tahun 2001. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara terbuka dengan pejabat pemerintah pada dinas instansi terkait dan para pengusaha pertambangan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan data sekunder didapat dari laporan-laporan tahunan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pertambangan & Energi Propinsi Jawa Barat, Kantor Lingkungan Hidup & Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya, Bagian Perekonomian dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tasikmalaya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif berupa analisis deskriptif/perbandingan, analisis rural rapid appraisal, analisis kontribusi, analisis pertumbuhan, dan analisis proyeksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha pertambangan golongan C khususnya yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya belum optimal, teknik penambangan tidak sesuai aturan, begitu pula perolehan pajaknya masih sangat rendah (di bawah 2 %) dibandingkan dengan sektor lain seperti pertanian dan perdagangan. Hal ini disebabkan masyarakat penambang tidak ditunjang dengan pendidikan yang cukup tentang teknik pertambangan, disamping itu masih banyaknya pengelola usaha pertambangan golongan C yang tidak dilengkapi dengan perizinan (PETI), akibatnya dampak kerusakan lingkungan semakin sulit dikendalikan. Masalah bimbingan, penyuluhan, pengawasan, penegakan hukum serta koordinasi antar instansi masih sangat lemah.

Di dalam mengembangkan usaha sektor pertambangan di masa yang akan datang, agar dapat memberikan kontribusinya terhadap pembangunan daerah, diperlukan upaya terobosan-terobosan serta peran dari Pemerintah Daerah seperti pembuatan Peraturan Daerah tentang perusahaan pertambangan yang lebih berkepihakan terhadap kegiatan usaha pertambangan skala kecil, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelanggar peraturan, mencari peluang investasi melalui peningkatan kegiatan promosi produk unggulan pertambangan, mengembangkan pola kemitraan, serta melakukan diversifikasi produk pertambangan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat penambang sehingga produk pertambangan memperoleh value added bagi daerah dan masyarakat.